



RENCANA STRATEGIS 2018-2023 (RENSTRA Perubahan)



**KECAMATAN
PADANG PANJANG TIMUR**
JL. H. SUMANIK NO. 1 PADANG PANJANG TELP. 0752-82894

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padang Panjang Timur ini.

Rencana Strategis ini disusun untuk memenuhi kewajiban Kecamatan Padang Panjang Timur dalam menyelenggarakan pemerintahan dan berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT). Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat berbagai strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Padang Panjang Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yakni Tahun 2018-2023.

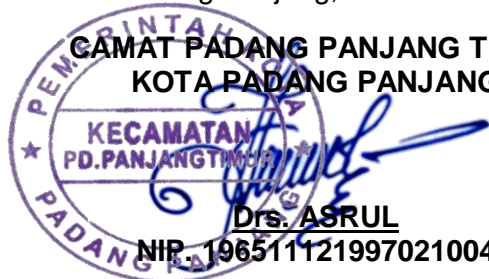
Mudah-mudahan Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur ini dapat menjadi pedoman dan arahan kinerja bagi seluruh komponen aparatur Pemerintah Kecamatan Padang Panjang Timur yang pada gilirannya dapat mewujudkan Visi dan Misi Kota Padang Panjang.

Usaha maksimal dalam penyusunan Rencana Strategis ini telah kami lakukan, namun kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur ini masih jauh dari sempurna dan secara terbuka kami senantiasa meminta petunjuk, kritik serta saran guna perbaikan dari penulisan Rencana Strategis ini.

Akhir kata semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan. Aamiin.

Padang Panjang, Januari 2023

**CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG**



Drs. ASRUL

NIP. 196511121997021004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	6
	1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	9
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Padang Panjang Timur	9
	2.2 Sumber Daya Kecamatan Padang Panjang Timur	15
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	25
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	26
	3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	26
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	30
	3.3 Telaahan Terhadap RTRW dan KLHS	32
	3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	32
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	33
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	33
	4.2 Indikator Tujuan dan Sasaran	34
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	40
BAB VI	RENCANA DAN PROGRAM SERTA PENDANAAN INDIKATIF	44
	6.1 Rencana Program dan Kegiatan	44
	6.2 Pendanaan Indikatif	46
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN	59
BAB VIII	PENUTUP	68

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

A. TABEL

1.	Tabel 2.1 Data Pegawai ASN, PH, THL Kecamatan Padang Panjang Timur	15
2.	Tabel 2.2 Data Kepegawaian Menurut Golongan	16
3.	Tabel 2.3 Data Kepegawaian Menurut Eselon	16
4.	Tabel 2.4 Data Kepegawaian Menurut Jenjang Pendidikan	16
5.	Tabel 2.5 Data Kepegawaian Menurut Diklat Yang Diikuti	17
6.	Tabel 2.6 Sarana Prasarana Kecamatan Padang Panjang Timur	17
7.	Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur	19
8.	Tabel 2.8 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur	22
9.	Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur	28
10.	Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Padang Panjang Timur	35
11.	Tabel 4.2 Lembaga Yang Ada Di Kecamatan Padang Panjang Timur	36
12.	Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Kecamatan Padang Panjang Timur	41
13.	Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif 2019-2023	47
14.	Tabel 7.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Perubahan RPJMD 2018-2023 Dan Pendanaan Indikatif	62
15.	TABEL RENSTRA dari Serambi Plan 2022	

B. GAMBAR

1.	Gambar 1. Struktur Organisasi Kecamatan Padang Panjang Timur	13
2.	Gambar 2. Struktur Organisasi Kelurahan Di Kecamatan Padang Panjang Timur	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional yang berisikan rangkaian kegiatan pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan taraf hidup seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rangka peningkatan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur yang merupakan bagian integral dari Pemerintah Kota Padang Panjang, serta mengisi rangkaian pembangunan yang selalu berpedoman pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2023 dan memperhatikan RPJPD Kota Padang Panjang tahun 2005 - 2025.

Untuk mencapai pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang pada umumnya dan Kecamatan Padang Panjang Timur pada khususnya yang berdaya guna dan berhasil guna untuk Tahun 2018 – 2023, di pandang perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padang Panjang Timur yang berisi Program dan Kegiatan sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kecamatan Padang Panjang Timur untuk terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Perencanaan Strategis merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik Lokal, Nasional dan Global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Manajemen Nasional. Suatu Instansi/Unit Kerja dituntut untuk mampu berkompetisi dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat seperti dewasa ini, perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2018 – 2023 merupakan Dokumen yang akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Padang Panjang Timur untuk Tahun 2018 – 2023 dan sebagai bahan rujukan dalam pembuatan Rencana Kerja Tahunan pada Kecamatan Padang Panjang Timur.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur berdasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan Tim Penyusunan, pengumpulan informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisa gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan Visi, Misi, Tujuan, sasaran, perumusan strategik, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 tahun, melaksanakan FGD antara bidang pembangunan, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Walikota serta penetapan oleh Camat untuk dapat dilaksanakan.

Keterkaitan Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dengan dokumen perencanaan, di antaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.

Selain peraturan perundang-undangan di atas, terbit pula beberapa peraturan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Peraturan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini

berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat, DPRD maupun masyarakat;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan ini terbit untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan ini ditujukan untuk keseragaman nomenklatur dan unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/

- Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Bersama Nomor : 0430/M.PPN/12/tahun 2016 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 18. Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 19. Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032;
22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032;
24. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

➤ MAKSUD

Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2018 - 2023 dimaksudkan sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Padang Panjang untuk dijadikan pedoman/acuan dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan penyelenggaraan pelayanan publik serta sebagai acuan untuk mengukur akuntabilitas serta menilai keberhasilan pelaksanaan program kerja selama 5 (lima) Tahun kedepan.

➤ TUJUAN

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur adalah untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang akan dijalankan di Kecamatan Padang Panjang Timur agar terarah serta

dapat menjamin tercapainya tujuan organisasi di Kecamatan Padang Panjang Timur yaitu :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan oleh Kecamatan Padang Panjang Timur sebagai penjabaran visi dan misi Walikota terpilih.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- c. Menerjemahkan visi dan misi Walikota kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur dengan berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode Perubahan RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategi Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2018 – 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.4 Telaahan Terhadap RTRW dan KLHS
- 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.2 Indikator Tujuan dan Sasaran

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang pembentukan organisasi dan susunan perangkat daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan bahwa Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur terdiri dari :

2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Padang Panjang Timur

Camat :

- Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota yang ada di kecamatan dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sekretariat :

- Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan kecamatan yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan.

Sekretariat terdiri dari :**1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program umum dan kepegawaian alam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi hukum, kehumasan, penyiapan bahan penyusunan rencana kebuuhan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana dan kehumasan.

2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan, melakukan perencanaan, dokumentasi kegiatan pembangunan perhubungan, koordinasi penusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program rencana pembangunan perhubungan, pembinaan pelaksanaan program, evaluasi program, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing seksi, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan.

Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di kelurahan-kelurahan, urusan kesatuan bangsa, kependudukan, ketenagakerjaan dan pengelolaan pendapatan daerah di ruang lingkup Kecamatan Padang Panjang Timur, mengkoordinir kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan membuat rekomendasi akte catatan sipil serta melakukan proses administrasi pemberian rekomendasi perizinan sporadik tanah.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanaman modal, tenaga kerja pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM, pembinaan lomba Kelurahan dan urusan pembangunan di Kecamatan.

Seksi Sosial

- Seksi Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan sosial dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan sosial, pendidikan, kebudayaan, pemuda, olah raga, kesehatan, pengendalian penduduk, KB, perlindungan anak dan perempuan.

Seksi Pelayanan

- Seksi Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pelayanan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup kecamatan dan kelurahan.

2.1.2 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelurahan

Lurah :

- Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pelayanan masyarakat, memelihara ketertiban umum, memelihara prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan umum, dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sekretariat :

- Sekretariat mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, pemeliharaan aset dan keuangan di lingkup Kelurahan.

Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan ketertiban umum dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan, pembinaan lomba kelurahan dan lurah berkompentensi, urusan kesatuan bangsa dan politik, kependudukan, mengkoordinasikan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, pengawasan dan penertiban bangunan, pembuangan air limbah, pengaliran drainase, persampahan, penanggulangan bencana, perpustakaan dan kearsipan di kelurahan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanaman modal, tenaga kerja pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM, urusan pembangunan dan penataan ruang, perumahan kawasan pemukiman dan lingkungan hidup di Kelurahan.

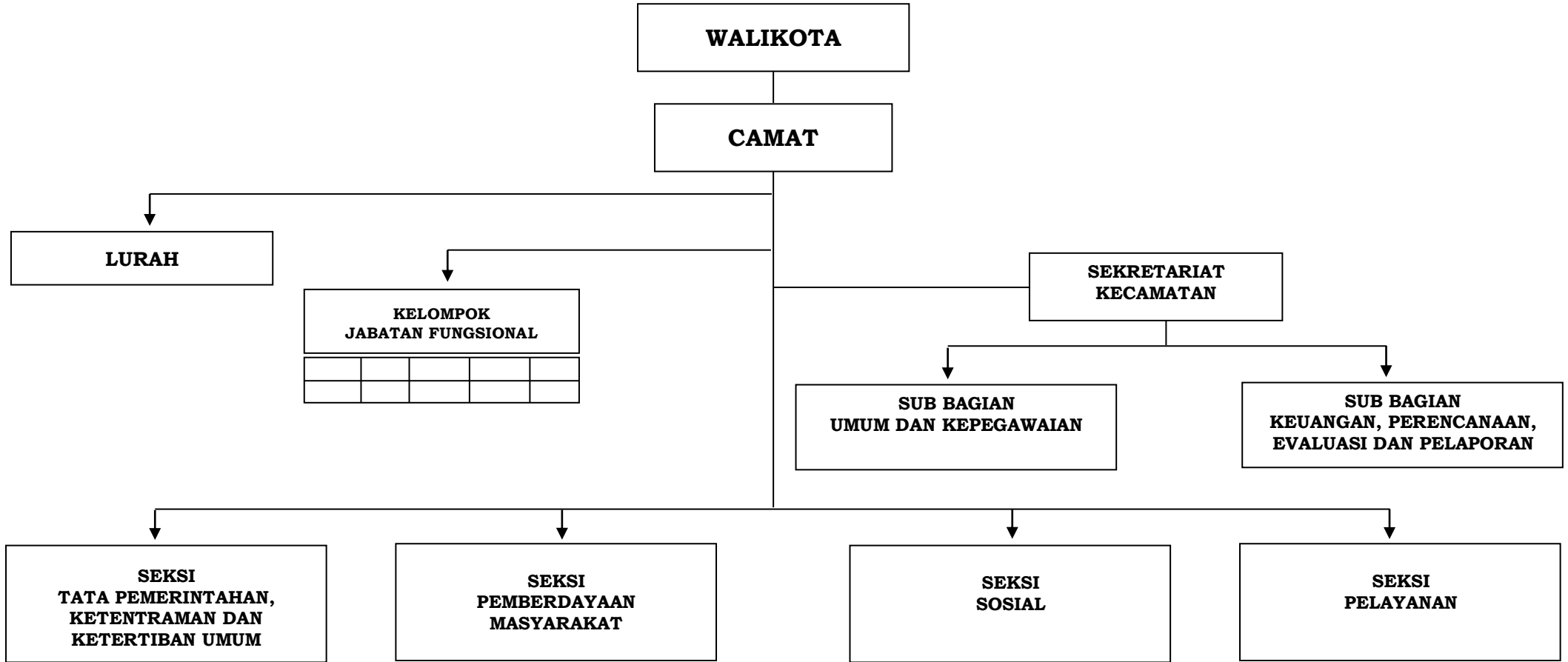
Seksi Pelayanan dan Sosial

- Seksi Pelayanan dan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pelayanan dalam arti menyiapkan

bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan perizinan dan non perizinan, sosial, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, pengendalian penduduk, keluarga berencana, perlindungan anak dan perempuan di Kelurahan.

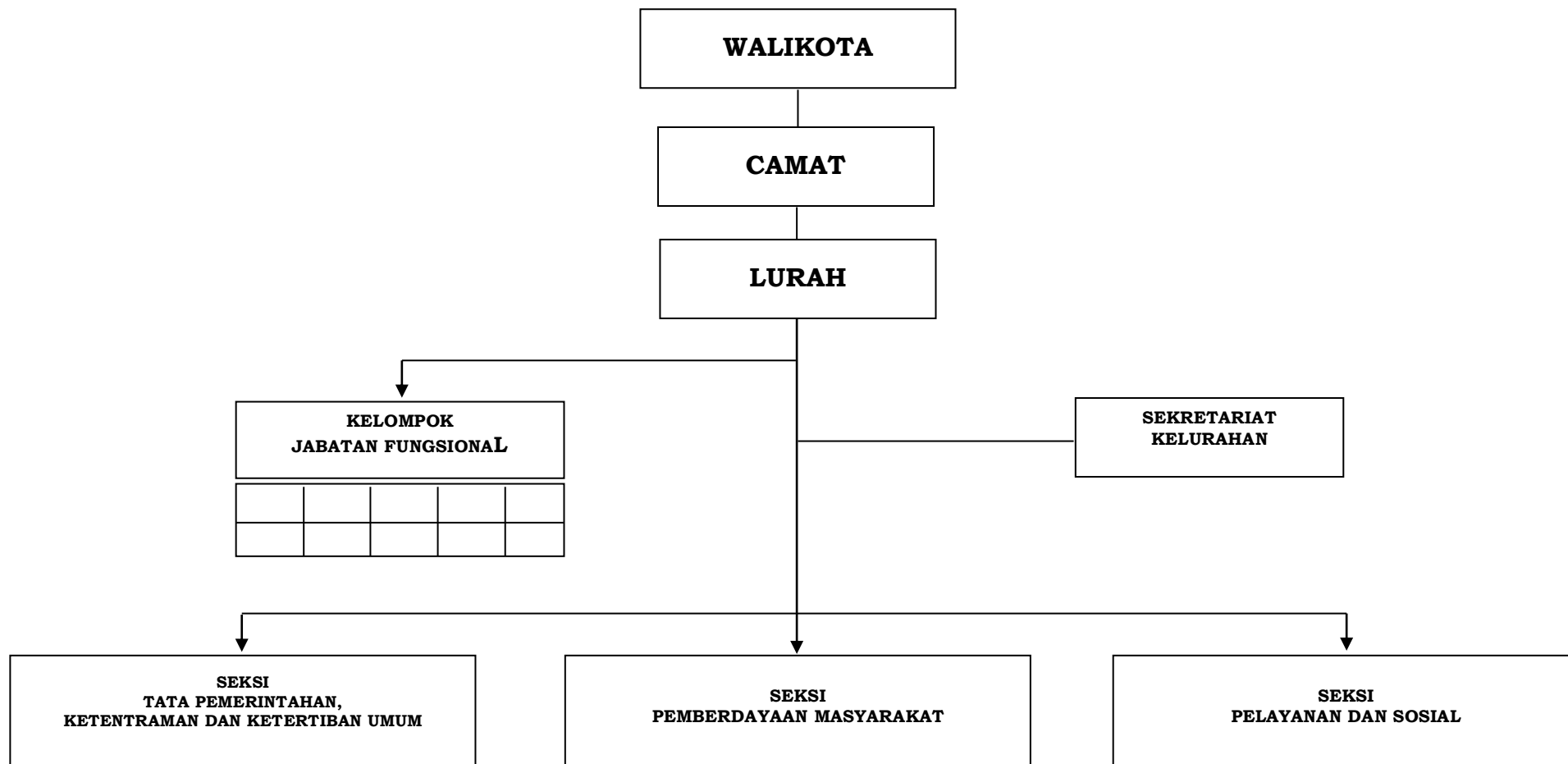
Gambar 1 : STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019



Gambar 2 : STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019



2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Kecamatan Padang Panjang Timur terdiri dari 8 (delapan) Kelurahan yaitu Kelurahan Ganting, Sigando, Ekor Lubuk, Ngalau, Guguk Malintang, Tanah Pak Lambik, Koto Panjang, dan Koto Katik. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, pemerintah Kecamatan Padang Panjang Timur didukung oleh 77 orang pegawai ASN, 2 orang Pegawai Honorer (PH), 32 Tenaga Harian Lepas (THL) selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut ini.

Tabel. 2.1
Data Pegawai ASN, PH, THL pada Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Padang Panjang Timur

No	Uraian	Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Camat	1	-	1 orang
2.	Sekretaris Camat	1	-	1 orang
3.	Kepala Seksi di Kecamatan	2	2	4 orang
4.	Kasubbag di Kecamatan	-	2	2 orang
5.	Fungsional Umum di Kecamatan	7	3	10 orang
6.	Tenaga Honorer	-	2	2 orang
7.	Tenaga Harian Lepas Kecamatan: - Operator - Penjaga Kantor - Sopir - Petugas kebersihan Kantor	1 2 2 1	1 - - 1	2 Orang 2 orang 2 orang 2 orang
8.	Lurah	8	-	8 orang
9.	Sekretaris Lurah	2	6	8 orang
10	Kasi di Kelurahan	9	15	24 orang
11	Fungsional Umum di Kelurahan	12	7	19 orang
12	Tenaga Harian Lepas di Kelurahan - Operator - Penjaga Kantor - Petugas Kebersihan Kantor	2 8 2	6 - 6	8 orang 8 orang 8 orang
	Total	60	51	111 orang

Sumber Data : Kecamatan Padang Panjang Timur, Desember 2021

Tabel 2.2
Data Kepegawaian Menurut Golongan

No.	Uraian	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Golongan IV	2 orang	1 orang	3 orang
2	Golongan III	30 orang	29 orang	59 orang
3	Golongan II	8 orang	5 orang	13 orang
4	Golongan I	1 orang	1 orang	2 orang
5	Pegawai Honorer	-	2 orang	2 orang
6	Tenaga Harian Lepas	18 orang	14 orang	32 orang

Sumber Data : Kecamatan Padang Panjang Timur, Desember 2021

Tabel 2.3
Data Kepegawaian Menurut Eselon

No.	Uraian	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Eselon III	1 orang	-	1 orang
2	Eselon IV.a	11 orang	2 orang	13 orang
3	Eselon IV.b	11 orang	23 orang	34 orang

Sumber Data : Kecamatan Padang Panjang Timur, Desember 2021

Tabel 2.4
Data Kepegawaian Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Strata II	3 orang	1 orang	4 orang
2	Strata I	22 orang	17 orang	39 orang
3	Diploma III	1 orang	1 orang	2 orang
4	SLTA	20 orang	12 orang	32 orang

Sumber Data : Kecamatan Padang Panjang Timur, Desember 2021

Tabel 2.5
Data Kepegawaian Menurut Diklat Yang Diikuti

No.	Uraian	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Diklat Perjenjangan ADUM / Kepemimpinan Tingkat IV	14 orang	21 orang	35 orang

Sumber Data : Kecamatan Padang Panjang Timur, Desember 2021

2.2.2 SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka memberikan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Adapun sarana dan prasarana kerja yang terinventarisasi di Kecamatan Padang Panjang Timur sebagai berikut :

Tabel. 2.6
Sarana Prasarana
Kecamatan Padang Panjang Timur

No	Uraian	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah	Kondisi		
					Baik	Rusak Ringan	Rusak berat
1	Gedung Kantor	1	8	9 unit	9	-	-
2	Kendaraan Dinas Roda 4	3	-	3 unit	-	-	-
3	Kendaraan Dinas Roda 2	10	42	52 unit	50	2	-
4	Kendaraan Dinas Roda 3 (Bentor)	-	16	8 unit	8	8	-
5	Meja Kerja ½ biro	20	56	76 unit	76	-	-
6	Meja Kerja Biro Eselon III	2		2 unit	2	-	-
7	Kursi Kerja (putar sandaran rendah)	11	24	36 unit	36	-	-
8	Kursi Kerja (putar sandaran tinggi)	1	8	9 unit	9	-	-
9	Kursi Rapat	110	200	310 bh	309	-	1
10	Komputer PC	12	24	36 unit	24	-	10
11	Laptop	6	8	14 unit	10	-	4
12	Printer	10	16	26 unit	21	1	4
13	Brankas	1	-	1 buah	1	-	-
14	Lemari arsip (kayu)	10	8	18 buah	18	-	-
15	Filling Cabinet	2	-	2 unit	-	-	2
16	Lemari Arsip (besi)	4	-	4 unit	4	-	-
17	Mesin Absen (Finger)	1	8	9 unit	9	-	-
18	Sofa	4	8	12 set	12	-	-
19	Bangku Tunggu	2	-	2 unit	2	-	-
20	Gordin/kry	25		25 bh	25	-	-
21	Sound System	2	8	10 set	2	-	4
22	Kamera DSLR	1	-	1 unit	-	-	1
23	Kamera Digital	2	-	2 unit		-	2
24	LCD Proyektor	2	3	5 set	5	-	-
25	Generator	2	8	10 unit	10	-	-
26	Tangga Lipat	2	-	2 unit	2	-	-
27	CCTV	1	-	1 unit	1	-	-
28	Mesin pemotong rumput	1	8	9 unit	9	-	-
29	Televisi	1	2	3 unit	3	-	-
30	Unit Power Suply (UPS)	1	-	1 unit	1	-	-
31	Air Conditioner (AC)	2	-	2 unit	2	-	-

Sumber Data : Kecamatan Padang Panjang Timur, Desember 2022

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengukuran kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang berdasarkan Permen Nomor 54 Tahun 2010 dapat diukur dengan menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya.

Pada Tahun 2018 Kecamatan Padang Panjang Timur dalam DPA OPD Perubahan telah melaksanakan 19 Program dan 51 Kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagian besar dari Rencana Kerja Tahun 2018 untuk mencapai 11 (sebelas) sasaran atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dapat dilihat pada lampiran Tabel 2.7 dan Tabel 2.8 sebagai berikut :

Tabel TC 27

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur
Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	TUJUAN																		
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif				100%	70%	75%	91%	93%	100%	70.73%	84.15%	98%	100%	100%	101.04%	112.20%	107.69%	107.53%
	SASARAN																		
	Persentase realisasi anggaran SATIMISAKE				85%	85%	87%	89%		85%	87%	89.46%	94.89%		100%	102.35%	102.83%	106.62%	
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan dan Kelurahan				31.01%	31.52%	33.93%	35.00%	37.00%	31.01%	31.52%	33.93%	38.07%	38.28%	100.00%	100.00%	100.00%	108.77%	103.46%
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)				na	83.9	88.97	89.25	89.5	na	83.90	88.97	97.80	0.00	na	100%	100%	110%	0%
	PROGRAM sesuai Permen 13																		
1	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara				46	46	55			46	46	55			100%	100%	100%		
2	Jumlah tenaga THL yang dibayarkan gajinya (sopir, cs, penjaga kantor)				21	21	21			21	21	21			100%	100%	100%		
3	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan				1450	1523	1250			1450	1523	1250			100%	100%	100%		
4	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan				25	22	15			25	22	15			100%	100%	100%		
5	Jumlah tenaga THL operator dan PH yang dibayarkan gajinya				12	12	12			12	12	12			100%	100%	100%		
6	Jumlah jenis Cetak Dokumen dan Jasa Surat Menyurat				4	4	4			4	4	4			100%	100%	100%		
7	Jumlah rekening Listrik, air dan telepon yang dibayarkan				34	34	34			34	34	34			100%	100%	100%		
8	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan				0	-	9			0	-	9			0%	0%	100%		
9	Jumlah Gedung dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara				110	110	109			110	110	109			100%	100%	100%		
10	Jumlah tingkatan sekolah yang dinilai				4	4	-			4	4	-			100%	100%	0%		
11	Jumlah rapat dan monev yang dilaksanakan FKPM				12	12	6			12	12	6			100%	100%	100%		
12	Jumlah hari besar yang dilaksanakan (Peringatan HUTRI dan HUT Kota)				2	2	1			2	2	1			100%	100%	100%		
13	Jumlah kegiatan Operasional Sistem Informasi Pelayanan Publik				1	1	-			1	1	-			100%	100%	0%		
14	Jumlah rapat Forkopimca yang dilaksanakan				6	6	4			6	6	4			100%	100%	100%		
15	Jumlah Operasional Persampahan, Pengawasan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum yang dilaksanakan				8	8	8			8	8	8			100%	100%	100%		
16	Jumlah pemenang Lomba Pendamping KUBE FM Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2018-2022 (rubahan)				3	3	-			3	3	-			100%	100%	0%		
17	Jumlah Kader Posyandu yang dibayarkan honorinya				190	190	190			190	190	190			100%	100%	100%		
18	Jumlah Kader Dasawisma yang dibayarkan honorinya				200	200	230			200	200	230			100%	100%	100%		
19	Jumlah pemenang Lomba Hari Kesatuan Gerak PKK KB Kes				3	3	-			3	3	-			100%	100%	0%		

16	Jumlah pemenang Lomba Pendamping KUBE FM				3	3	-			3	3	-			100%	100%	#DIV/0!		
17	Jumlah Kader Posyandu yang dibayarkan honorinya				190	190	190			190	190	190			100%	100%	100%		
18	Jumlah Kader Dasawisma yang dibayarkan honorinya				200	200	230			200	200	230			100%	100%	100%		
19	Jumlah pemenang Lomba Hari Kesatuan Gerak PKK KB Kes				3	3	-			3	3	-			100%	100%	#DIV/0!		
20	Jumlah RT yang difasilitasi				100	100	103			100	100	103			100%	100%	100%		
21	Jumlah lembaga LPM yang difasilitasi				9	9	9			9	9	9			100%	100%	100%		
22	Jumlah Posyantek yang di fasilitasi				1	1	1			1	1	1			100%	100%	100%		
23	Jumlah lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)				9	9	9			9	9	9			100%	100%	100%		
24	Jumlah Forum Komunikasi Kecamatan/Kelurahan Sehat yang difasilitasi				9	9	9			9	9	9			100%	100%	100%		
25	Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Pemberdayaan Masyarakat				1	1	1			1	1	1			100%	100%	100%		
26	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan/Kelurahan				2	2	2			2	2	2			100%	100%	100%		
27	Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				8	8	8			8	8	8			100%	100%	100%		
28	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8	8	8			8	8	8			100%	100%	100%		
29	Jumlah musholla yang dikunjungi tim ramadhan kecamatan				8	8	8			8	8	8			100%	100%	100%		
30	Jumlah kegiatan MTQ yang dilaksanakan				-	1	-			-	1	-			0%	100%	0%		
31	Jumlah lembaga Karang Taruna yang difasilitasi				9	9	9			9	9	9			100%	100%	100%		

Jumlah Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan							5 urusan	7 urusan				5 urusan	5 urusan				100%	100%
Jumlah Forum Komunikasi Kecamatan dan Pokja Sehat							9	9				9	9				100%	100.00%
Jumlah Lembaga PKK yang diberdayakan (2021 terletak di sub keg Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan)							9	9				9	9				100%	100.00%
Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan							9	9				9	9				100%	100.00%
Jumlah Kader Posyandu yang dibayarkan honorinya							190	190				190	190					
Jumlah Kader Dasawisma yang dibayarkan honorinya (2021 terletak di sub keg Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan)							281	281				281	281				100%	100.00%
Jumlah Tingkatan Sekolah yang dibina dan pemenang LSS tingkat kecamatan								4, 12					0				0%	0.00%
Jumlah kegiatan yang diperlombakan KKG PKK KB Kes (2021 terletak di sub keg Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan)								3					0				0%	0.00%
Jumlah Pemenang KUBE FM							0	0				0	0				0%	0.00%
Jumlah kegiatan Forum Anak yang terfasilitasi							0	0				0	0				0%	0.00%
Jumlah kegiatan Forum Literasi yang terfasilitasi							0	0				0	0				0%	0.00%
Jumlah Himpaudi yang difasilitasi							0	0				0	0				0%	0.00%
III Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan							21.78%	22.17%				25.17%	45.88%				116%	206.95%
Jumlah jenis pemberdayaan desa/kelurahan yang dilaksanakan							8 keg	-				8 keg	-				100%	0.00%
jumlah kegiatan musrenbang kelurahan yang dilaksanakan (tahun 2021 musren 8 kelurahan)							8 keg	-				8 keg	-				100%	0.00%
Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan							5 jenis	6 jenis				5 jenis	6 jenis				100%	75.00%
jumlah musrenbang yang dilaksanakan (utk 2021 hanya musren kecamatan)							1 keg	9 keg				1 keg	9 keg				100%	100.00%
Jumlah kegiatan sarana prasarana yang dilaksanakan (untuk 2021 keg pengadaan alat studio gantung TV)							1 keg	-				1 keg	-				100%	0.00%
Jumlah peserta yang dilatih							200	229				160	200				80%	87.34%
Jumlah lembaga LPM yang diberdayakan (2021 LPM terletak di sub keg Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan)							9	9				9	9				100%	100.00%
Jumlah monitoring, evaluasi dan penilaian BBGRM yang dilaksanakan							0	3				0	0				0%	0.00%
Jumlah pemenang lomba kelurahan berprestasi							0	3				0	3				0%	100.00%
Jumlah Lembaga Posyantek yang diberdayakan							2	9				2	9					100.00%
Jumlah Lembaga Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) yg dilaksanakan							0	0				0	1					0.00%
Jumlah RT (thn 2021 termasuk LPM)							103 RT	106 RT				103 RT	105 RT				100%	99.06%
Jumlah jenis kegiatan RT yang dilaksanakan (untuk 2021 termasuk LPM)							6 keg	6 keg				6 keg	6 keg				100%	100.00%
IV Angka Tingkat Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum							20 laporan	15 laporan				20 laporan	10 laporan				100%	66.67%
Jumlah Jenis Kegiatan Koordinasi Trantib							2 jenis	2 jenis				2 jenis	2 jenis				100%	100.00%
Jumlah Rapat-rapat FKPM yang dilaksanakan di kecamatan dan kelurahan							157 kali	49 kl, 108 kali				97 kali	49 kali, 96 kali				62%	92.36%
V Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan							100%	100%				100%	100%				100%	100%
Jumlah Urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah							2 urusan	4 urusan				2 urusan	4 urusan				100%	100.00%
Jumlah Mushalla yang dikunjungi oleh Tim Ramadhan Kecamatan							8 Mushalla	8 Mushalla				8 Mushalla	8 Mushalla				100%	100.00%
Jumlah cabang MTQ yang diperlombakan							0	8 cabang				0	8 cabang				100%	100.00%
Jumlah Rapat yang dilaksanakan oleh Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Kecamatan							4 kali	4 kali				4 kali	4 kali				100%	100.00%
Jumlah Peringatan Hari Besar yang dilaksanakan (HUT RI dan HUT Kota)							0	2 hr besar				0	2 hr besar				0%	100.00%

Tabel TC 28

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur
Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan		
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Anggaran	Realisasi	
		2	3	4	5	6	11	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	PROGRAM awal (sesuai Permen 13)																		
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2,196,863,300	1,668,471,600				1,932,161,945	957,357,171				0.88	0.57					-24.05%	-50.45%
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	431,993,000	270,000,000				397,435,000	148,980,500				0.92	0.55					-37.50%	-62.51%
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	95,000,000					94,200,000					0.99						-100.00%	-100.00%
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1,750,000					1,750,000					1.00						-100.00%	-100.00%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN	2,777,831,000	1,638,433,000				190,479,350	1,147,157,510				0.07	0.70					-41.02%	502.25%
6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN CAMAT	10,100,000					9,210,250					0.91						-100.00%	-100.00%
7	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT KECAMATAN/KELURAHAN	3,239,222,000					3,089,509,725					0.95						-100.00%	-100.00%
8	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN/KELURAHAN	3,022,950,000	7,986,612,300				1,246,330,385	4,385,781,850				0.41	0.55					164.20%	251.90%
9	PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	3,127,535,500					2,390,112,490					0.76						-100.00%	-100.00%

	PROGRAM PERUBAHAN (sesuai Permen 90)																
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11,545,107,512	11,955,260,795	11,582,161,237			11,031,729,441	11,534,537,524			0.96	0.96	0.00	0.22%	4.56%
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			9,409,039,963	9,852,691,312	9,496,041,686			9,124,560,918	9,652,638,957			0.97	0.98	0.00	0.55%	5.79%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9,409,039,963	9,852,691,312	9,496,041,686			9,124,560,918	9,652,638,957			0.97	0.98	0.00	0.55%	5.79%
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			518,415,900	511,669,850	414,320,300			465,912,817	449,403,593			0.90	0.88	0.00	-10.16%	-3.54%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			35,306,700	32,621,700	23,102,300			33,625,900	31,659,500			0.95	0.97	0.00	-18.39%	-5.85%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			180,160,750	175,804,400	140,084,300			159,679,700	166,404,150			0.89	0.95	0.00	-11.37%	4.21%
	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan			57,513,800	50,862,250	41,033,700			46,021,750	38,221,700			0.80	0.75	0.00	-15.44%	-16.95%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			245,434,650	252,381,500	210,100,000			226,585,467	213,118,243			0.92	0.84	0.00	-6.96%	-5.94%
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			-	68,000,000	-			-	68,000,000			0.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin			-	68,000,000	-			-	68,000,000			0.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			1,120,854,149	1,144,355,033	1,117,801,781			1,038,019,975	1,069,081,971			0.93	0.93	0.00	-0.11%	2.99%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6,560,000	6,290,000	2,400,000			4,837,000	4,648,000			0.74	0.74	0.00	-32.98%	-3.91%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik			89,577,349	84,029,033	91,864,981			57,977,278	60,353,363			0.65	0.72	0.00	1.57%	4.10%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1,024,716,800	1,054,036,000	1,023,536,800			975,205,697	1,004,080,608			0.95	0.95	0.00	-0.02%	2.96%
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			496,797,500	378,544,600	553,997,470			403,235,731	295,413,003			0.81	0.78	0.00	11.27%	-26.74%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan			100,369,000	-	-			74,786,900	-			0.75	0.00	0.00	0.00%	-100.00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			84,244,500	200,822,100	155,957,470			76,049,876	167,945,800			0.90	0.84	0.00	58.02%	120.84%
Renstra	Kecamatan Padang Par			2018-2023 (Perubahan)													
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			209,288,000	87,952,500	81,460,000			169,329,300	58,334,500			0.81	0.66	0.00	-32.68%	-65.55%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			102,896,000	89,770,000	316,580,000			83,069,655	69,132,703			0.81	0.77	0.00	119.95%	-16.78%

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			209,288,000	87,952,500	81,460,000			169,329,300	58,334,500				0.81	0.66	0.00	-32.68%	-65.55%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			102,896,000	89,770,000	316,580,000			83,069,655	69,132,703				0.81	0.77	0.00	119.95%	-16.78%
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2,640,675,750	3,780,676,250	3,716,157,550			2,508,580,560	3,636,844,995				0.95	0.96	0.00	20.73%	44.98%
	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>			213,409,350	-	-			207,675,800	-				0.97	0.00	0.00	0.00%	-100.00%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Persampahan + Bentor Kel. Ganting 2021)			213,409,350	-	-			207,675,800	-				0.97	0.00	0.00	0.00%	-100.00%
	<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum</i>			1,493,619,900	1,612,820,050	1,609,653,000			1,460,305,360	1,585,773,452				0.98	0.98	0.00	3.89%	8.59%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Persampahan+Bentor 7 Kel 2021) 8 KEL 2022			1,493,619,900	1,612,820,050	1,609,653,000			1,460,305,360	1,585,773,452				0.98	0.98	0.00	3.89%	8.59%
	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat</i>			933,646,500	2,167,856,200	2,106,504,550			840,599,400	2,051,071,543				0.90	0.95	0.00	64.68%	144.00%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (KT, FKKS, UKS, Posyandu 2021)			933,646,500	-	-			840,599,400	-				0.90	0.00	0.00	0.00%	-100.00%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (FKKS,Pokja Sehat, PKK, KT, Posyandu, Dasawsima, UKS, HKG PKK KB Kes, Forum Anak, Forum Literasi, Himpaudi 2022)			-	2,167,856,200	2,106,504,550			-	2,051,071,543				0.00	0.95	0.00	0.00%	#DIV/0!
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			3,925,914,850	2,814,103,200	2,915,527,576			3,764,708,125	2,752,234,381				0.96	0.98	0.00	-12.36%	-26.89%
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>			83,162,450	-	-			72,945,600	-				0.88	0.00	0.00	0.00%	-100.00%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Musrenbang 8 Kel)			83,162,450	-	-			72,945,600	-				0.88	0.00	0.00	0.00%	-100.00%
	Renstrat Kecamatan Padang Par			1,363,387,900	645,362,200	612,568,576			1,437,710,500	589,295,381				0.92	0.91	0.00	-31.90%	-59.01%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Musrenbang Kecamatan)			38,937,400	121,181,400	97,596,400			35,275,400	116,699,400				0.91	0.96	0.00	95.88%	230.82%

	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1,563,387,900	645,362,200	612,568,576			1,437,710,500	589,295,381			0.92	0.91	0.00	-31.90%	-59.01%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Musrenbang Kecamatan)			38,937,400	121,181,400	97,596,400			35,275,400	116,699,400			0.91	0.96	0.00	95.88%	230.82%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (TV Ganting 2021)			28,233,850	-	-			28,135,000	-			1.00	0.00	0.00	0.00%	-100.00%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dasawisma, PKK, Posyantek 2021)			1,496,216,650	-	-			1,374,300,100	-			0.92	0.00	0.00	0.00%	-100.00%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pelatihan, LPM, BBGRM, Kel berprestasi, Posyantek, Forikan 2022)			-	524,180,800	514,972,176			-	472,595,981			0.00	0.90	0.00	0.00%	0.00%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			2,279,364,500	2,168,741,000	2,302,959,000			2,254,052,025	2,162,939,000			0.99	1.00	0.00	0.67%	-4.04%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (2022 RT) (2021 RT, LPM)			2,279,364,500	2,168,741,000	2,302,959,000			2,254,052,025	2,162,939,000			0.99	1.00	0.00	0.67%	-4.04%
IV	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			414,868,400	26,675,000	24,971,000			155,794,300	22,987,450			0.38	0.86	0.00	-49.98%	-85.24%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum			414,868,400	26,675,000	24,971,000			155,794,300	22,987,450			0.38	0.86	0.00	-49.98%	-85.24%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (2022 FKPM) (2021FKPM, keg Posko Satgas Covid-19)			414,868,400	26,675,000	24,971,000			155,794,300	22,987,450			0.38	0.86	0.00	-49.98%	-85.24%
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			42,242,500	426,621,450	47,759,700			32,111,450	357,851,905			0.76	0.84	0.00	410.56%	1014.41%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			42,242,500	426,621,450	47,759,700			32,111,450	357,851,905			0.76	0.84	0.00	410.56%	1014.41%
	Pembinaan Kerukunan Antarsukudat Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional (2021Tim Ramadhan) (2022 keg tim ramadhan, mtq kec, mtq kota)			33,042,500	365,261,450	38,320,000			23,245,000	315,376,730			0.70	0.86	0.00	457.96%	1256.75%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (2021 forkopimca, hutri) (2022 forkopimca, hutri, hutkota)			9,200,000	61,360,000	9,439,700			8,866,450	42,475,175			0.96	0.69	0.00	241.17%	379.06%

Interpelasi/Penjabaran dari Tabel 2.7 dan Tabel 2.8

Dari Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan sebagai berikut :

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan keterlibatan dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan seperti kegiatan musrenbang, gotong royong, berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan event/festival
2. Adanya peningkatan disiplin aparatur
3. Adanya lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang cukup baik
4. Adanya kemauan aparatur untuk peningkatan kinerja
5. Adanya pengawasan Internal
6. Adanya penilaian kinerja

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dalam rangka melaksanakan Misi Ketiga pasangan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang terpilih yaitu "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif" dihadapkan pada beberapa tantangan yang harus dihadapi, antara lain :

Tantangan :

- Keterbatasan lahan yang relative sempit dengan kondisi tanah berbukit, bertebing sehingga terbatas untuk diolah dan dikembangkan secara optimal
- Kemajuan teknologi informasi membuat adanya inovasi pelayanan publik di Kecamatan

Peluang :

- Adanya pelimpahan sebagian kewenangan kepada Kecamatan
- Adanya sumber daya manusia / jumlah penduduk yang potensial
- Adanya sumber daya alam yang dapat di olah
- Adanya organisasi kemasyarakatan yang cukup baik
- Adanya Pengarusutamaan Gender
- Kerjasama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan

Disadari bahwa kondisi sampai dengan Tahun 2018-2022 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan dengan baik seperti :

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di Kecamatan
2. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM di Kecamatan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sehubungan dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan kepada Kecamatan dan Kelurahan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, maka untuk kelancaran pelimpahan kewenangan dimaksud dibutuhkan sumber daya aparatur yang handal dan diperlukan sarana dan prasarana serta pembiayaan yang memadai. Dan disamping itu karena adanya alih tugas dari pemegang jabatan yang lama kepada pemegang jabatan yang baru perlu diadakan pendidikan dan pelatihan guna menunjang pelaksanaan tugas sehingga bisa meningkatkan etos kerja.

Dengan adanya sumber daya alam yang dapat diolah masih terdapat lahan yang relative sempit dengan kondisi tanah berbukit, berlurah dan tanah landai, sehingga terbatas untuk diolah dan dikembangkan secara optimal, maka salah satu usaha peningkatan ekonomi masyarakat melalui industri/kerajinan dan bidang jasa lainnya, untuk itu diperlukan bimbingan, pendidikan dan latihan serta pengetahuan kewirausahaan.

Dengan adanya indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan maka untuk pencapaian dimaksud perlu adanya peningkatan ekonomi masyarakat, untuk itu diperlukan berbagai pembinaan dan bimbingan pendidikan dan pelatihan serta memberikan kredit usaha lemah dalam pengembangan usahanya.

Dengan adanya lembaga/organisasi masyarakat yang belum berfungsi secara optimal, maka kepada tokoh masyarakat agar dapat melakukan langkah-langkah dengan memberikan pembinaan dan orientasi kepada masyarakat.

Dengan adanya kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana, masih terdapatnya sarana dan prasarana yang belum memadai antara lain drainase, MCK, Rumah Tak Layak Huni dan fasilitas umum lainnya.

Dengan adanya personil Kecamatan Padang Panjang Timur yang tingkat pendidikan dan kemampuan bervariasi dan masih terdapat kurangnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas dan profesionalisme, untuk itu diperlukan Pendidikan dan Pelatihan sehingga dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan prima dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana antara lain internet, laptop, komputer dan lain – lain. Disamping itu sebagai penunjang pelayanan prima dibutuhkan media elektronik dan media cetak yang ditempatkan pada ruang tunggu

pelayanan umum, serta papan informasi untuk menempelkan edaran dan informasi pada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Padang Panjang Timur ada beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Padang Panjang Timur

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Aturan yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Internal (Kewenangan)	Eksternal (di Luar kewenangan)	
1	2	3	4	5	6
1. Masih rendahnya SDM aparatur di Kecamatan dan Kelurahan	SDM yang ada tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki		Mengoptimalkan aparatur yang ada	Kurang selektifnya penempatan aparatur	Belum optimalnya pelayanan di Kecamatan
2. Belum tersedianya aparatur di Bidang Teknis	Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan masih minta bantuan tenaga teknis pada OPD lainnya		Mengoptimalkan aparatur yang ada	Terbatasnya aparatur di Kota Padang Panjang di bidang Teknis	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan di Kecamatan
3. Masih kurangnya staf di masing-masing seksi	Dalam melaksanakan tugas ditangani langsung oleh masing-masing seksi		Mengoptimalkan aparatur yang ada	Pertambahan staf pada tertentu	Belum optimalnya pelayanan di Kecamatan
4. Belum memadainya dukungan anggaran	Anggaran yang tersedia tidak memenuhi untuk pelayanan		Mengoptimalkan anggaran yang tersedia	Terbatasnya anggaran	Belum optimalnya pelayanan di Kecamatan
5. Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan tugas	Belum optimalnya koordinasi antar seksi		Memberikan bimbingan dan rapat koordinasi	Kurangnya regulasi dan pengawasan	Belum optimalnya kegiatan pelayanan

antara seksi					
6. Masih rendah partisipasi masyarakat dalam gotong royong	Masih kurangnya rasa kegotong royongan di tengah-tengah masyarakat saat ini		Mengajak elemen yang ada di masyarakat dan mendorong efektifnya lembaga yang ada	Kurangnya sosialisasi pada masyarakat	Belum optimalnya kegiatan kegotong royongan di tengah-tengah masyarakat
7. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan pemerintah	Masyarakat merasa kebijakan pemerintah akan merugikan pribadi yang bersangkutan		Memberikan sosialisasi kebijakan pemerintah	Kurangnya sosialisasi dari OPD terkait	Belum optimalnya SDM penyuluhan di Kecamatan

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kota Padang Panjang agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama-sama masyarakat Kota Padang Panjang telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

a) Visi

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholder) yang ada di Kota Padang Panjang. Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang merupakan komitmen politik yang hendak diwujudkan dan sekaligus sebuah gambaran cita-cita untuk bergerak bersama seluruh masyarakat Kota Padang Panjang, pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi dalam pembangunan demi kejayaan Padang Panjang, yaitu :

“Untuk Kejayaan Padang Panjang Yang Bermarwah Dan Bermartabat”

b) Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, maka ditetapkan misi yang merupakan pembajabaran dari visi. Rumusan misi yang diangkat didasarkan pada isu-isu strategis di Kota Padang Panjang. Misi Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan;
2. Meningkatkan Pemerataan kualitas daya saing SDM Masyarakat yang berakhlak dan berbudaya;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif.

Perumusan Penjelasan Misi RPJMD

No	Misi	Penjelasan Misi
1.	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan yang menggunakan pendekatan pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam menggerakkan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi secara merata sehingga dapat menemukan momentumnya di tengah arus ekonomi global
2.	Meningkatkan Pemerataan kualitas daya saing SDM Masyarakat yang berakhlak dan berbudaya	Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi
3.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif	Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada peningkatan penyelenggaraan teknis pemerintahan yang berdasarkan prinsip akuntabilitas, terkontrol, responsive, professional, efisien dan efektif, transparan, visioner dan partisipatif serta supremasi hukum dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat

3.3 Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada Perubahan RPJMD Kota Padang Panjang tidak ada yang terkait langsung dengan program pada Kecamatan Padang Panjang Timur.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Adapun isu-isu Strategis yang akan ditangani melalui Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun Rencana adalah :

1. Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan
3. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai apa yang diharapkan sesuai dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran sendiri biasa direpresentasikan melalui penetapan indikator kinerja. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja selama 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

4.1.1 **Tujuan** dari Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 sesuai Perubahan RPJMD:

” Meningkatkan peran serta kelompok / lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan”.

4.1.2 **Sasaran** dari Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 sesuai Perubahan RPJMD ada 2 (dua) yaitu:

- **Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan, Kelurahan**
- **Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan**

4.2 Indikator Tujuan dan Sasaran

Untuk mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan maka diperlukan indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan capaian tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut di atas. Indikator ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode dapat dicapai. Keterkaitan antara perumusan tujuan dan sasaran selanjutnya dapat dituangkan dalam format Tabel 4.1 sebagai berikut :

TABEL 4.1

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
MENGACU PADA PERUBAHAN RPJMD KOTA PADANG PANJANG**

RPJMD AWAL										RPJMD PERUBAHAN									
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
					2019	2020	2021	2022	2023						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga masyarakat dalam pembangunan		Persentase lembaga masyarakat aktif	(Jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif/Jumlah Lembaga Sosial yang ada) x 100%	70	75	80	85	90	1	Meningkatnya peran serta kelompok / lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	(Jumlah lembaga masyarakat aktif / Total jumlah lembaga masyarakat yang ada) x 100%	100	90	91	93	95
		Meningkatnya pelaksanaan satimisake	Persentase realisasi anggaran SATIMISAKE	(Total Realisasi Anggaran Kelurahan diluar Rutin / Total Anggaran Belanja Kelurahan diluar Rutin) x 100%	85	87	89	91	93			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan, kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	(Jumlah anggaran partisipasi / Total Belanja Langsung kecamatan dan kelurahan) x 100%	31.52	33.93	35.00	37.00	39.00
			Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan/Kelurahan	(Jumlah anggaran partisipasi / Total Belanja Langsung kecamatan dan kelurahan) x 100%	21	22	23	24	25			Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	(kuisisioner, aplikasi)	83.90	88.97	89.25	89.50	90.00
			Nilai Layanan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan/kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80	80.5	81	81.5	82										

4.2.1 Penjelasan Tabel 4.1 “Tujuan” Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur

Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur **”Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan”** dengan Indikator Tujuan Kinerja **”Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif”** dengan Definisi Operasional **”Perbandingan jumlah lembaga masyarakat yang aktif dengan jumlah lembaga masyarakat yang ada dan dinyatakan dalam persentase”**

Dengan Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah lembaga masyarakat aktif}}{\text{Total jumlah lembaga masyarakat yang ada}} \times 100\%$$

Tabel 4.2
Lembaga/Forum/Organisasi Masyarakat yang Ada di Kecamatan Padang Panjang Timur

No	Lembaga	Jumlah		Jumlah yang Aktif	Jumlah yang Ada	Ket
		KEL	KEC			
1	RT	105	0	105	105	
2	PKK	8	1	9	9	
3	LPM	8	1	9	9	
4	KARANG TARUNA	8	1	9	9	
5	POSYANDU	8	-	8	8	
6	POSYANTEK (Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna)	-	1	1	1	
7	WARTEK (warung teknologi)	8	-	8	8	
8	FKKS (forum komunikasi kecamatan sehat)	-	1	1	1	
9	POKJA Kelurahan Sehat	8	-	8	8	
10	HIMPPAUDI (Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini)	-	1	1	1	
11	POKJA HIMPPAUDI	8	1	8	8	
12	Forum Literasi	8	1	9	9	
13	FORUM ANAK	8	1	9	9	
14	FORIKAN (Forum Peningkatan Konsumsi Ikan)	8	1	1	1	
	TOTAL	185	10	195	195	

Sumber Data : Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun, Desember 2022

Untuk tahun 2022 jumlah lembaga/forum/ormas yang aktif pada kecamatan maupun di kelurahan se Kecamatan Padang Panjang Timur sebanyak 195. Total lembaga/pokmas yang ada saat ini (2022) adalah sebanyak 195 lembaga. Target 2022 sebesar 93% dengan **realisasi 100%**, dan **capaian realisasi sebesar 108%** melebihi target yang ditetapkan. Yang menjadi faktor pengungkit pada indikator tujuan ini dikarenakan telah aktifnya secara menyeluruh lembaga/pokmas/ormas yang ada saat ini di Kecamatan Padang Panjang Timur.

4.2.2 Penjelasan Tabel 4.1 “Sasaran” Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur terdiri dari 2 (dua) Sasaran Kinerja yaitu:

1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan, Kelurahan dengan Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan
 2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan dengan Indikator Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
- Untuk mencapai Target Sasaran Pertama dengan Indikator Kinerja “Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan” dengan definisi operasional sebagai berikut : “Perbandingan Jumlah Anggaran Partisipasi dengan Total Belanja Langsung Kecamatan dan Kelurahan dan dinyatakan dalam persentase”.

Dengan Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah anggaran partisipasi}}{\text{Total belanja langsung kecamatan dan kelurahan}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp. 3.502.800.000,-}}{\text{Rp. 9.150.645.383,-}} \times 100\% \\ = 38,28\%$$

(Sumber Data : Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2022)

Yang dimaksud dengan anggaran belanja langsung pada kecamatan dan kelurahan yaitu keseluruhan anggaran belanja langsung pada kecamatan dan kelurahan di tahun berjalan, sedangkan untuk anggaran partisipasi dihitung dengan perkiraan dana/anggaran partisipasi masyarakat pada kegiatan-kegiatan seperti:

- Kegiatan Gotong Royong Rutin Masyarakat
- Kegiatan Gotong Royong Acara Kubu Gadang
- Kegiatan Poskamling
- Kegiatan Perlombaan
- Kegiatan Keolahragaan
- Kegiatan Rapat-rapat
- Kegiatan Inovasi di Kelurahan
- Kegiatan gotong royong lainnya yang melibatkan masyarakat
- Dan lain-lain.

Jadi untuk tahun 2022 ini pencapaian sasaran strategis pertama dengan indikator sasaran “Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan” dengan target tahun 2022 sebesar 37% dengan realisasi sebesar 38,28% dengan capaian realisasi 103%. Faktor penguangkit dari pencapaian ini disebabkan tingginya kepedulian masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan di kecamatan/kelurahan seperti gotong royong dan lain-lain serta keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan yang didorong oleh kesadaran yang tinggi tentang pentingnya keterlibatan masyarakat.

- Untuk sasaran strategis kedua dengan Indikator Kinerja yaitu “Nilai Survey Kepuasan Masyarakat” dengan Definisi Operasional berupa questioner terhadap kepuasan pelayanan dan Aplikasi yang dijalankan”.

Dengan rumus : Total Nilai Interval Konversi x 25

$$\text{Total NIK tahun 2021} = 3,912 \times 25 = 97,80 / \text{SANGAT BAIK}$$

(sumber : Laporan SKM oleh LPPM Andalas, 2021).

Jadi tahun 2021 nilai SKM Kecamatan Padang Panjang Timur sebesar 97,80 dengan target yang ditetapkan sebesar 89,25 dan capaian realisasi sebesar 109,58% melebihi target yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa Kecamatan Padang Panjang Timur sudah memberikan pelayanan yang sangat baik kepa masyarakat.

Adapun Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur yang diberikan kepada masyarakat sebanyak 7 (tujuh) Layanan tahun 2021, yaitu :

- Advice Planning
- IMB dengan luas bangunan di bawah 100 Milyar dan tidak bertingkat
- Legalisasi Pengantar SKCK
- Surat Keterangan Dispensasi Nikah
- Legalisasi Keterangan Ahli Waris
- Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu
- Legalisasi Daftar Susunan Keluarga untuk Pensiun PNS

Sedangkan aplikasi yang dijalankan antara lain :

Aplikasi LAKON (Layanan Kelurahan Kecamatan Online) merupakan layanan pembuatan surat-surat Masyarakat secara online seperti Subsidi DJK SDM (Aplikasi Subsidi Listrik Masyarakat).

Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan oleh Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Padang Panjang Timur menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur, selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur.

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran, maka untuk mencapainya telah ditetapkan 2 (dua) strategi dan 4 (empat) arah kebijakan seperti pada Tabel 5.1, berikut ini :

TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG

RENSTRA AWAL				RENSTRA PERUBAHAN							
VISI : UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERKUALITAS				VISI : UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT							
MISI 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif				MISI 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif							
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Definisi operasional	Rumusan (Cara Hitung)
Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya Kinerja Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/Kelurahan	Mendorong peningkatan lembaga pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga masyarakat dalam pembangunan							
		Menyelenggarakan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan	Optimalisasi pelayanan pemerintahan kecamatan/kelurahan		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan, kelurahan	Mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat kecamatan / kelurahan	Meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga masyarakat kecamatan / kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan	Perbandingan Jumlah Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan kecamatan/kelurahan seperti (RT, LPM, Karang Taruna, PKK, Posyandu, Dasawisma, FKPM, FKKS, BKM, dll) dengan Jumlah Penduduk usia produktif (15 -60 tahun) yang dinyatakan dalam persentase	(Jumlah Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan kecamatan/kelurahan / Jumlah Penduduk usia produktif x 100%
					Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan sarana dan kualitas layanan kecamatan/kelurahan	Optimalisasi pelayanan kecamatan/kelurahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Tingkat Layanan	Perbandingan dari jumlah layanan yang diberikan dengan jumlah total layanan yang menjadi kewenangan pemerintah kecamatan yang dinyatakan dalam persentase (Pelayanan Advice Planning, IMB, Legalisasi Pengantar SKCK, Surat Keterangan Dispensasi Nikah, Legalisasi Keterangan Ahli Waris, Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu, Legalisasi Daftar Susunan Keluarga untuk Pensiun PNS)	(jumlah layanan yang diberikan/jumlah total layanan yang menjadi kewenangan pemerintah kecamatan) x 100%
							Optimalisasi koordinasi trantibum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Angka Tingkat Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kasus pelanggaran yang dilaporkan di kecamatan padang panjang timur	Jumlah laporan pelanggaran yang diterima oleh kecamatan
							Optimalisasi koordinasi pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	Perbandingan antara Jumlah urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan dengan Jumlah urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai dengan penugasan kepala daerah yang dinyatakan dalam persentase	Jumlah urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan / Jumlah urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai dengan penugasan kepala daerah x100%

Dalam rangka pencapaian dua strategi tersebut di atas, ditetapkan program yang mendukung strategi tersebut yaitu :

❖ **Strategi Pertama** yaitu Mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang meliputi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Sub kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa (Musrenbang kelurahan, 2021)

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Sub kegiatan : peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (musrenbang kecamatan dan musrenbang kelurahan).
- Sub kegiatan : pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (fisik)
- Sub kegiatan : pemberdayaan masyarakat di kelurahan (Posyantek, LPM, pelatihan², kelurahan berprestasi, BBGRM, Forikan).

c. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- Sub kegiatan : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (lembaga RT)

❖ **Strategi Kedua** yaitu Peningkatan sarana dan kualitas layanan kecamatan/kelurahan, dengan program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan dan sub kegiatan, terdiri dari :

a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan sub kegiatan :

- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (kegiatan persampahan dikelurahan ganting, 2021)
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan

b. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, dengan sub kegiatan :

- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (kegiatan persampahan diseluruh kelurahan)

c. kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat, dengan sub kegiatan :

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (FKKS, PKK, Karang Taruna, Posyandu, Dasawisma, LSS, KKG PKK KB Kes, Kube FM, Forum Anak, Forum Literasi, Himpaudi).
2. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan dan sub kegiatan, yaitu :
- a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan sub kegiatan :
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (kegiatan FKPM, Posko Satgas Covid-19 thn 2021)
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan dan sub kegiatan yaitu :
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan sub kegiatan
 - Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas dan NasionalKeamanan Lokal, Regional (kegiatan Ramadhan, MTQ)
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (kegiatan Forkopimca, HUT RI dan HUT Kota)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Untuk mencapai Sasaran Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018-2023, program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Padang Panjang Timur terkait bidang pemerintahan, sesuai deskripsi, data dan analisis beserta perubahannya dalam indikasi kegiatan, maka Program dan Kegiatan Kecamatan Padang Panjang Timur sebagai berikut :

1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan
6. Program peningkatan pelayanan kedinasan kecamatan
7. Program Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan
8. Program Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan
9. Program Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

Dengan adanya perubahan Nomenklatur Permendagri Nomor 13 tahun 2006 ke Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, maka Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2021-2023 mengalami perubahan sebagai berikut :

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	5. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

		Pemerintah Daerah	
		3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 10. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		6. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	13. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
		7. Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat	14. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	15. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
			16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
		9. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	17. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 18. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	10. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	19. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	11. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	20. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional
			21. Pelaksanaan Tugas, Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6.2 Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Padang Panjang Timur selama 5 (lima) tahun kedepan, sebagaimana dalam Tabel 6.1 dibawah ini :

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF 2018-2023
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		PERINGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB													
							TARGET 2019		TARGET 2020		TARGET 2021		TARGET 2022		TARGET 2023		Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)														
							Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=(8+10+12+14+16)	22														
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR																		21.975.494.800	21.601.304.650,00	18.568.809.012	18.721.590.476	17.827.498.456	98.694.697.394	KEC PPT								
AWAL																																
Meningkatkan peran serta kelompok/lembaga masyarakat dalam pembangunan				BELANJA TIDAK LANGSUNG		100%	100%	9.572.250.000	100%	8.950.000.000							18.522.250.000															
				Belanja Pegawai (Gaji dan TPP)	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	9.572.250.000	100%	8.950.000.000	0	0					18.522.250.000															
				BELANJA LANGSUNG		100%	100%	12.403.244.800	100%	12.651.304.650								25.054.549.450														
				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100%	100%	2.196.863.300	100%	1.736.968.400								3.933.831.700														
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis materai	100%	100%	8.670.000	100%	7.740.000	0	0						16.410.000														
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening tagihan yg dibayarkan	100%	100%	126.980.000	100%	175.499.400	0	0						302.479.400														
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kend dinas yg dipelihara	100%	100%	311.871.000	100%	230.520.000	0	0						542.391.000														
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah tenaga kebersihan kantor yg dibayarkan gajinya, jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	100%	100%	649.781.000	100%	619.340.000	0	0						1.269.121.000														
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	100%	100%	86.720.000	100%	57.850.000	0	0						144.570.000														
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah cetak dan penggandaan yg disediakan	100%	100%	51.139.800	100%	39.950.000	0	0						91.089.800														
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis alat-alat listrik yang disediakan	100%	100%	35.750.000	100%	24.120.000	0	0						59.870.000														
				Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makan dan minuman yang disediakan	100%	100%	252.831.500	100%	92.709.000	0	0						345.540.500														
				Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran	jumlah tenaga honoror dan operator yang dibayarkan gajinya	100%	100%	368.120.000	100%	399.240.000	0	0						767.360.000														
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	jumlah rapat-rapat dan koordinasi yang dilaksanakan	100%	100%	305.000.000	100%	90.000.000	0	0						395.000.000														

						PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi		100%	100%	431.993.000	100%	460.950.000								892.943.000		
						Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas yang diadakan		-	-	-	100%	199.950.000	0	0							199.950.000	
						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang diadakan		100%	100%	89.993.000	100%	-	0	0							89.993.000	
						Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara		100%	100%	106.000.000	100%	145.250.000	0	0							251.250.000	
						Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kantor	Jumlah alat-alat kantor yang dipelihara		100%	100%	32.500.000	100%	115.750.000	0	0							148.250.000	
						Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Jumlah gedung yang dipelihara		100%	100%	15.000.000	100%	-	0	0							15.000.000	
						Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor	Jumlah alat-alat kantor yang dipelihara		100%	100%	35.000.000	100%	-	0	0							35.000.000	
						Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung yang direhab		100%	100%	153.500.000	100%	-	0	0							153.500.000	
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100%	100%	95.000.000	100%	-									95.000.000	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek yg diikuti		100%	100%	95.000.000	100%	-	0	0							95.000.000	
						PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Peningkatan pengembangan sistem perencanaa dan kinerja pelaporan keuangan		100%	100%	1.750.000	100%	-									1.750.000	
						Penyusunan Perencanaan dan Palaporan Kinerja Perangkat Daerah			100%	100%	500.000	100%	-	0	0							500.000	
						Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah			100%	100%	1.250.000	100%	-	0	0							1.250.000	

Meningkatnya Pelaksanaan SATIMISAKE				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan	Cakupan layanan Kecamatan-Kelurahan	100%	100%	1.971.611.000	100%	1.820.552.000		-		-		-	3.792.163.000
				Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Terpilihnya pemenang lomba sekolah sehat	100%	100%	34.160.000	100%	500.000	0	0	0	0	0	0	34.660.000
				Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (FKPM)	Jumlah kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan kejahatan yang dilakukan	100%	100%	120.668.500	100%	39.953.000	0	0	0	0	0	0	160.621.500
				Kegiatan Peringatan HUT RI dan HUT Kota	Jumlah peringatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan	100%	100%	68.070.500	100%	33.635.000	0	0	0	0	0	0	101.705.500
				Kegiatan Operasional Sistem Informasi Pelayanan Publik	Implementasi dan Sosialisasi aplikasi e Kecamatan dan e Kelurahan	100%	100%	54.932.000	100%	41.520.000	0	0	0	0	0	0	96.452.000
				Kegiatan Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Tentang Masalah Kedinasan Kamtibmas di Kecamatan	Jumlah Forum Komunikasi dan Koordinasi Kedinasan Camat tentang masalah Kamtibmas di Kecamatan yang dilaksanakan	100%	100%	10.100.000	100%	12.000.000	0	0	0	0	0	0	22.100.000
				Operasional Persampahan, Pengawasan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	Jumlah Kelurahan yang di Pelihara Kebersihan	100%	100%	1.683.680.000	100%	1.692.944.000	0	0	0	0	0	0	3.376.624.000
				Program Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan	100%	100%	7.706.027.500	100%	8.632.834.250							16.338.861.750
				Monitoring Evaluasi dan BBGRM	Terlaksananya kegiatan BBGRM tingkat Kecamatan	100%	100%	18.286.000	0%	-	0	0	0	0	0	0	18.286.000
				Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Posyandu	Jumlah Kader Posyandu yang dibina dan Jumlah Pemenang Lomba Kader Posyandu TK Kecamatan	100%	100%	8.757.000	100%	731.480.000	0	0	0	0	0	0	740.237.000
				Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Dasawisma	Jumlah Kader Dasawisma yang dibina dan Jumlah Pemenang Lomba Kader Dasawisma TK Kecamatan	100%	100%	16.195.000	100%	963.240.000	0	0	0	0	0	0	979.435.000
				Kegiatan Lomba HKG dan Imunisasi	Jumlah Pemenang Lomba HKGPKKBkes Tk Kecamatan	100%	100%	29.250.000	100%	28.210.000	0	0	0	0	0	0	57.460.000
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Kelurahan/Pedesaaa	Jumlah Penyediaan Operasional dan Seragam RT	100%	100%	2.259.600.000	100%	2.136.316.000	0	0	0	0	0	0	4.395.916.000

Renstra Kecamatan Padang Panjang Tahun 2018-2023 (Perubahan)

PERUBAHAN																						
Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga masyarakat dalam pembangunan						% lembaga kemasyarakatan yang aktif	(Jumlah lembaga masyarakat aktif / total jumlah lembaga masyarakat yang ada di kecamatan) x 100%		-	100,00		90,00		91,00		93,00		95,00		95,00	-	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan						% partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	(Jumlah anggaran partisipasi / Total Belanja Langsung kecamatan dan kelurahan) x 100%	30,01	31,52			33,93		35,00		37,00		39,00		39,00	-	
Meningkatnya kualitas layanan publik yang transparan dan akuntabel di kecamatan dan kelurahan						Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	(kuisioner, aplikasi)	na	83,90			88,97		89,25	-	89,50	-	90,00	-	90,00		
			7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi				-			90%	11.545.107.512	90	11.618.360.426	90	11.517.698.456	90,00	34.681.166.394	KEC PPT
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah		100,00	-	-	100	9.409.039.963	100	9.372.281.756	100	9.334.411.956	100	28.115.733.675			
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan				76 orang		9.409.039.963	77	9.372.281.756	78	9.334.411.956	77 orang	28.115.733.675			
			7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kepegawaian						100		100		100				
			7	01	01	2.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia								80		80				

		7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Rata-rata realisasi fisik sub kegiatan(jumlah realisasi fisik subkegiatan / jumlah sub kegiatan)							90	518.415.900	90	531.517.750	90	370.000.000	90,00	1.419.933.650	
		7	01	01	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan							10 jenis	35.306.700	10	33.432.700	10	30.000.000	10,00	98.739.400	
		7	01	01	2.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									180.160.750		182.137.900		145.000.000		507.298.650	
								Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan							40 jenis	180.160.750	40		40	145.000.000	40,00	325.160.750	
								Jumlah Retribusi sampah yang dibayarkan di kelurahan dan kecamatan							0	-	12		12	-	12,00	-	
		7	01	01	2.0	05	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan							9 jenis	57.513.800	9	53.270.800	9	40.000.000	9,00	150.784.600	
		7	01	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									245.434.650		262.676.350		155.000.000		663.111.000	
								Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti							40kali	166.534.650	20		20	110.000.000	80 kali	276.534.650	
								Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan							12258 ok	78.900.000	1.258		1.250	45.000.000	12516 ok	123.900.000	

		7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang dipenuhi / Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan							90	-	90	80.680.000	90	50.000.000	100,00	130.680.000			
		7	01	01	2.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan									0	-			1	-		-		
		7	01	01	2.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan									0	-	0	-	0	-		-		
		7	01	01	2.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan									1 kegiatan	-	8	80.680.000	5	50.000.000		130.680.000		
		7	01	01	2.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang diadakan (mushola kantor camat)									-	-	-	-	1	-		-		
		7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	Rata-rata realisasi fisik sub kegiatan(jumlah realisasi fisik subkegiatan / jumlah sub kegiatan)								100	1.120.854.149	100	1.178.345.270	100	1.141.968.000	100	3.441.167.419		
		7	01	01	2.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan									1 jenis	6.560.000	1	6.560.000	1	2.100.000		15.220.000		
		7	01	01	2.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan									34 tagihan rekening	89.577.349	34	91.903.670	34	92.000.000	34 tagihan rekening	273.481.019		
		7	01	01	2.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Harian Lepas yang dibayarkan, Jumlah Tenaga Honoror yang dibayarkan									35 orang	1.024.716.800	36	1.079.881.600	36	1.047.868.000	36orang	3.152.466.400		

			7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	Rata-rata realisasi fisik sub kegiatan (jumlah realisasi fisik subkegiatan / jumlah sub kegiatan)	90	496.797.500	100	455.535.650	100	621.318.500	100	1.573.651.650		
			7	01	01	2.01	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	35	100.369.000	0	0	0			100.369.000		
			7	01	01	2.02	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	12	84.244.500	47	191.699.600	48	193.318.500			469.262.600	
			7	01	01	2.06	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara (thn 2021 termasuk gedung 7 unit)	100, 7 unit	209.288.000	100	116.304.050	100	71.000.000			396.592.050	
			7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara (hanya 2 unit pemel gdg kel ngalau dan ktr camat th 2021)	2	102.896.000	9	147.532.000	10	357.000.000			607.428.000	
			7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan	100	2.640.675.750	100	3.904.665.300	100	3.575.000.000	100	10.120.341.050	Kec PPT	
			7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan ditingkat kecamatan	12 kali	213.409.350	12	-	12	-	12	213.409.350	Kec PPT	
			7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kelurahan pelayanan persampahan yang dilakukan (kel ganting)	1 kelurahan	213.409.350	0	0	0	0	1	213.409.350		
									Jumlah petugas persampahan yang dibayarkan gajinya	6 orang		0	0	0	0		-		
									jumlah sarana persampahan yg dipelihara	1 unit		0	0	0	0		-		

			7	01	02	2.0	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah peserta sosialisasi pelayanan	Banyaknya masyarakat yang mengikuti sosialisasi pelayanan yang menjadi kewenangan pemerintah kecamatan									30 orang	-	30	-	20	-	-	-		
			7	01	02	2.0	03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan	Banyaknya rapat koordinasi layanan persampahan yang dilaksanakan										48 kali	1.493.619.900	48	1.632.411.550	48	1.610.964.000	48	4.736.995.450	Kec PPT
			7	01	02	2.0	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kelurahan yang menerima pelayanan persampahan (untuk anggaran 2021 7 kel)	Banyaknya kelurahan yang menerima layanan persampahan										7 kelurahan	1.493.619.900	8	1.632.411.550	8	1.610.964.000		4.736.995.450	
									Jumlah petugas persampahan yang dibayarkan gajinya	Banyaknya petugas persampahan yang dibayarkan gajinya										42 orang		48		48			-	
									jumlah sarana persampahan yg dipelihara	Banyaknya sarana persampahan yang dipelihara										7 unit		8		8			-	

		7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan	Banyaknya urusan kelembagaan yang dilimpahkan ke Kecamatan					8 urusan	933.646.500	11	2.272.253.750	11	1.964.036.000		5.169.936.250	Kec PPT	
		7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat								933.646.500		2.272.253.750		1.964.036.000		5.169.936.250		
		7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat								933.646.500		2.272.253.750		1.964.036.000		5.169.936.250		
							Jumlah Forum Komunikasi Kecamatan dan Pokja Sehat	banyaknya forum komunikasi kecamatan dan pokja sehat					9 lembaga		9		9				-	
							Jumlah Lembaga PKK yang diberdayakan	Banyaknya lembaga PKK yang diberdayakan					9 lembaga		9		9				-	
							Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	Banyaknya kegiatan karang taruna yang dilaksanakan selama satu tahun					4 keg		4		4				-	
							Jumlah Honor Kader Posyandu yang dibayarkan honorinya	Banyaknya kader posyandu yang dibayarkan honorarium tepat waktu					190 orang		190		190				-	
							Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan honorinya	Banyaknya kader dasawisma yang dibayarkan honorarium tepat waktu					281 orang		285		290				-	
							Jumlah tingkatan Sekolah yang dibina dan pemenang LSS tingkat kecamatan	Banyaknya sekolah yang dibina, Banyaknya sekolah yang dinilai					4 tingkatan, 12 pemenang		4, 12		4, 12				-	
							Jumlah kegiatan yang diperlombakan oleh KKG PKK KB Kes	Banyaknya kegiatan yang diperlombakan KKG PKK KB Kes					3 keg		3		3				-	
							Jumlah Pemenang KUBE FM	Banyaknya sekolah yang dinilai					3 pemenang		3		3				-	
							Jumlah kegiatan Forum Anak yang terfasilitasi	Banyaknya forum anak di kecamatan					0		9		9				-	
							Jumlah kegiatan Forum Literasi yang terfasilitasi	Banyaknya forum literasi di kecamatan					0		1		1				-	
							Jumlah Himpaudi yang difasilitasi	Banyaknya lembaga Himpaudi di kecamatan					0		1		1				-	

			7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan	Perbandingan Jumlah Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan kecamatan/kelurahan seperti (RT, LPM, Karang Taruna, PKK, Posyandu, Dasawisma, FKPM, F KKS, BKM, dll) dengan Jumlah Penduduk usia produktif (15 -60 tahun) yang dinyatakan dalam persentase											21,78%	3.925.914.850	22,17	2.815.981.500	24,00	2.640.400.000	24%	9.382.296.350	Kec PPT			
			7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan yang dilaksanakan	Banyaknya kegiatan musrenbang kelurahan yang dilaksanakan												8 keg	83.162.450	0	-	0	-		83.162.450	Kec PPT		
			7	01	03	2.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan yang dilaksanakan (musrenbang 8 kel)	Banyaknya kegiatan musrenbang kelurahan yang dilaksanakan													8 keg	83.162.450	0	-	0	-		83.162.450		
			7	01	03	2.02	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Banyaknya jenis kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan													7 jenis	1.563.387.900	8	626.192.650	8	478.000.000		2.667.580.550	Kec PPT	
			7	01	03	2.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan (untuk anggaran 2021 hanya musren kec)	Banyaknya kegiatan musrenbang yang dilaksanakan													1 keg	38.937.400	9	149.135.000	9	110.000.000		298.072.400		
			7	01	03	2.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan sarana prasarana yang dilaksanakan (untuk 2021 keg pengadaan alat studio gantung TV)	Banyaknya kegiatan sarana prasarana yang dilaksanakan														1 keg	28.233.850	1	-	8	80.000.000		108.233.850	
			7	01	03	2.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																1.496.216.650		477.057.650		288.000.000		2.261.274.300		
								Jumlah peserta yang dilatih	Banyaknya peserta yang mengikuti pelatihan													160 orang		200		250	120.000.000		120.000.000		
								Jumlah lembaga LPM yang diberdayakan	Banyaknya lembaga LPM yang diberdayakan													9 lembaga		9		9	108.000.000		108.000.000		
								Jumlah monitoring, evaluasi dan penilaian BBGRM yang dilaksanakan	Banyaknya monitoring evaluasi dan penilaian BBGRM yang dilaksanakan													3		3		3	-		-		
Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2018-2023 (Perubahan)										61																					
								Jumlah pemenang lomba kelurahan berprestasi	Banyaknya kelurahan yang mengikuti lomba													3		3		3	15.000.000		15.000.000		
								Jumlah Lembaga Posyantek yang diberdayakan	Banyaknya lembaga Posyantek yang diberdayakan													9 lembaga		9		9	27.000.000		27.000.000		

					Jumlah peserta yang dilatih	Banyaknya peserta yang mengikuti pelatihan					160 orang		200		250	120.000.000		120.000.000	
					Jumlah lembaga LPM yang diberdayakan	Banyaknya lembaga LPM yang diberdayakan					9 lembaga		9		9	108.000.000		108.000.000	
					Jumlah monitoring, evaluasi dan penilaian BBGRM yang dilaksanakan	Banyaknya monitoring evaluasi dan penilaian BBGRM yang dilaksanakan					3		3		3	-		-	
					Jumlah pemenang lomba kelurahan berprestasi	Banyaknya kelurahan yang mengikuti lomba					3		3		3	15.000.000		15.000.000	
					Jumlah Lembaga Posyantek yang diberdayakan	Banyaknya lembaga Posyantek yang diberdayakan					9 lembaga		9		9	27.000.000		27.000.000	
					Jumlah lembaga Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) yg dilaksanakan	Banyaknya lembaga Forikan yang diberdayakan					0		9		9	18.000.000		18.000.000	
		7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah RT	Banyaknya RT di wilayah Kecamatan Padang Panjang Timur			103 RT	2.279.364.500	106	2.189.788.850	106	2.162.400.000		6.631.553.350	Kec PPT
		7	01	03	2.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis kegiatan RT yang dilaksanakan (untuk 2021 termasuk LPM)	Banyaknya jenis kegiatan RT yang dilaksanakan (keg. Pelaporan data kependudukan (masuk/datang, keluar/pindah, lahir, mati), menghadiri undangan, gotong royong)			6 keg	2.279.364.500	6	2.189.788.850	6	2.162.400.000		6.631.553.350	

			7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Angka Tingkat Pelanggaran Ketertiban dan Ketertiban Umum	Jumlah kasus pelanggaran yang dilaporkan di kecamatan padang panjang timur						20	lap	414.868.400	15	41.492.000	10	27.000.000	100	483.360.400	Kec PPT
			7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Jenis Kegiatan Koordinasi Trantib	Banyaknya rapat dan money yang dilaksanakan FKPM						2	jenis	414.868.400	2	41.492.000	2	27.000.000		483.360.400	Kec PPT
			7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										414.868.400		41.492.000		27.000.000		483.360.400	
									Jumlah Rapat-rapat FKPM yang dilaksanakan di kecamatan dan kelurahan	Banyaknya monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan FKPM						108	kali	414.868.400	108	41.492.000	108	27.000.000		483.360.400	
									Jumlah Money yg dilaksanakan oleh FKPM	Banyaknya Rapat-rapat FKPM pada kecamatan dan kelurahan						49	kali		49		54		-		
									Jumlah Posko Satgas Covid-19 yang di fasilitasi	Banyaknya Posko Satgas Covid-19						9	posko		0		0		-		
			7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	Perbandingan antara Jumlah urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan dengan Jumlah urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai dengan penugasan kepala daerah yang dinyatakan dalam persentase						100%		42.242.500	100%	341.091.250	100%	67.400.000	100	450.733.750	Kec PPT
			7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	Banyaknya urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah						3		42.242.500	4	341.091.250	4	67.400.000		450.733.750	Kec PPT
			7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas dan NasionalKeamanan Lokal, Regional										33.042.500		267.292.250		40.000.000		340.334.750	
									Jumlah Mushalla yang dikunjungi oleh Tim Ramadhan Kecamatan	Banyaknya Mushalla yang dikunjungi oleh tim ramadhan kecamatan						8	mushalla	33.042.500	8		8	40.000.000		73.042.500	
									Jumlah cabang MTQ yang diperlombakan	Banyaknya cabang MTQ yang diperlombakan tingkat kecamatan						0		-	8		0	0		-	
			7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan										9.200.000		73.799.000		27.400.000		110.399.000	
									Jumlah Rapat yang dilaksanakan oleh Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Kecamatan	Banyaknya rapat koordinasi yang dilaksanakan Forkopimca						4	kali	9.200.000	4		4	7.400.000		16.600.000	
									Jumlah Peringatan Hari Besar yang dilaksanakan (HUT Ri dan HUT Kota)	Banyaknya hari besar (HUT Ri dan HUT Kota)						2	hari besar	-	2		2	20.000.000		20.000.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari keberhasilan penyelenggaraan Perangkat Daerah pada tahun akhir periode Renstra. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program Perangkat Daerah setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Indikator kinerja secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan. Suatu indikator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Lebih lanjut, ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran ditetapkan dalam Tabel yang mengacu pada Perubahan RPJMD 2018-2023 dibawah ini.

1. **Instansi** : **KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR**
2. **Tugas** : Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat Kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
4. **Fungsi** :
 - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat Kecamatan;
 - e. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;

- f. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- g. Pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. **Tujuan** : **“Meningkatnya Peran Serta Kelompok / Lembaga Masyarakat Dalam Pembangunan”**

4. **Indikator Tujuan** : **“Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif”**.

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	Definisi operasional	REALISASI		TARGET			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
	Pemerintahan Kecamatan								
a	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	%	(Jumlah anggaran partisipasi / Total Belanja Langsung kecamatan dan kelurahan) x 100%	31,52	33,93	35	37	39	39
	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan	%	Perbandingan Jumlah Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan kecamatan/kelurahan seperti (RT, LPM, Karang Taruna, PKK, Posyandu, Dasawisma, FKPM, FKKS, BKM, dll) dengan Jumlah Penduduk usia produktif (15 - 60 tahun)			21,78	22,17	24	24
b	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	nilai	Hasil survey IKM	83,90	88,97	89,25	89,5	90	90
	Persentase Tingkat Layanan	%	Perbandingan dari jumlah layanan yang diberikan dengan jumlah total layanan yang menjadi kewenangan pemerintah kecamatan yang dinyatakan dalam persentase (Pelayanan Advice Planning, IMB, Legalisasi Pengantar SKCK, Surat Keterangan Dispensasi Nikah, Legalisasi Keterangan Ahli Waris, Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu, Legalisasi Daftar Susunan Keluarga untuk Pensiun PNS)	100	100	100	100	100	100
	Angka Tingkat Pelanggaran Ketertarikan dan Ketertiban Umum	laporan	Jumlah kasus pelanggaran yang dilaporkan			20	15	10	10
	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	%	Perbandingan antara Jumlah urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan dengan kepala daerah			100	100	100	100

Indikator Kinerja serta Pendanaan Pagu Indikatif Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk periode 2018- 2023 dapat dilihat dalam Tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS PERUBAHAN RPJMD YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 2018 - 2023
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG TAHUN**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB		
									Realisasi 2019		Realisasi 2020		Target 2021		Realisasi 2021		Target 2022		Target 2023		Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
									Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=(11+13+17+19+21)	24		
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR										18.717.230.661		20.102.055.804,20		18.568.809.012		17.492.923.876		18.721.590.476		17.827.498.456		92.861.299.273	KEC PPT		
AWAL																									
Meningkatkan peran serta kelompok/lembaga masyarakat dalam pembangunan				BELANJA TIDAK LANGSUNG			100%	100%	100%	9.366.186.865	100%	8.733.935.143													
				Belanja Pegawai (Gaji dan TPP)	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	orang	100%	100%	100%	9.366.186.865	100%	8.733.935.143	0	0											
				BELANJA LANGSUNG			100%	100%	100%	9.351.043.796	100%	11.368.120.661													
				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan layanan administrasi		100%	100%	100%	1.932.016.596	100%	1.477.023.713													
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis materai		100%	100%	100%	7.461.000	100%	7.152.000	0	0											
				Penyediaan Jasa Komunikasi.Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening tagihan yg dibayarkan		100%	100%	100%	62.925.766	100%	77.385.661	0	0											
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kend dinas yg dipelihara		100%	100%	100%	226.271.938	100%	194.313.740	0	0											
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah tenaga kebersihan kantor yg dibayarkan gajinya ,jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan		100%	100%	100%	603.050.704	100%	547.678.044	0	0											
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan		100%	100%	100%	85.077.755	100%	57.100.800	0	0											
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah cetak dan penggandaan yg disediakan		100%	100%	100%	40.087.000	100%	30.605.900	0	0											
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis alat-alat listrik yang disediakan		100%	100%	100%	31.507.500	100%	23.400.500	0	0											
				Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makan dan minuman yang disediakan		100%	100%	100%	235.770.750	100%	81.311.150	0	0											
				Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran	jumlah tenaga honorer dan operator yang dibayarkan gajinya		100%	100%	100%	338.023.896	100%	370.608.872	0	0											
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	jumlah rapat-rapat dan koordinasi yang dilaksanakan		100%	100%	100%	301.840.287	100%	87.467.046	0	0											
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi		100%	100%	100%	397.435.000	100%	421.470.400													
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah pengadaan kendaraan dinas yang diadakan		-	-	-	-	100%	189.150.000	0	0											
				Pengadaan Peralengkapan Gedung Kantor	jumlah pengadaan gedung kantor yang diadakan		100%	100%	100%	89.493.000	100%	89.493.000	0	0											
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung yang dipelihara		100%	100%	100%	100.493.750	100%	138.169.600	0	0											
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kantor	jumlah alat-alat kantor yang dipelihara		100%	100%	100%	18.001.800	100%	94.150.800	0	0											
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung yang dipelihara		100%	100%	100%	14.962.750	100%	14.962.750	0	0											

PERUBAHAN																								
Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga masyarakat dalam pembangunan																								
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan																								
Meningkatnya kualitas layanan publik yang transparan dan akuntabel di kecamatan dan kelurahan																								
		7 01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Rata-rata realisasi fisik kegiatan penunjang (jumlah realisasi fisik kegiatan / jumlah kegiatan)	%		na	na	83,90			88,97		89,25							
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	%					100,00					100	9.409.039.963	100	9.124.560.918	100			
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	orang							76	9.409.039.963	76	9.124.560.918	77	9.372.281.756	78	9.334.411.956	77		
		7 01	01	2.05	Administrasi Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kepegawaian	Rata-rata realisasi fisik sub kegiatan penunjang (jumlah realisasi fisik subkegiatan / jumlah sub kegiatan)	%									100					100		
		7 01	01	2.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	stel															80		80
		7 01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Rata-rata realisasi fisik sub kegiatan (jumlah realisasi fisik subkegiatan / jumlah sub kegiatan)	%							90	518.415.900	90	465.912.817	90	531.517.750	90	370.000.000	90,00	1.104.754.217
		7 01	01	2.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	jenis							10	35.306.700	10	33.625.900	10	33.432.700	10	30.000.000	10,00	97.058.600	
		7 01	01	2.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan	jenis								40	180.160.750	40	159.679.700	40	182.137.900	40	145.000.000	40,00	304.679.700
					Jumlah Retribusi	Jumlah Retribusi dibayarkan di kecamatan dan kelurahan	bulan							0		0						12		12,00
		7 01	01	2.005	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jenis							9	57.513.800	6	46.021.750	9	53.270.800	9	40.000.000	9,00	139.292.550	

		7	01	02		PROGRAM PEMELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan	Perbandingan dari jumlah layanan yang diberikan dengan jumlah total layanan yang menjadi kewenangan pemerintah kecamatan yang dinyatakan dalam persentase	%	na	na				100	2.640.675.750	100	2.508.580.560	100	3.904.665.300	100	3.575.000.000	100	9.988.245.860	Kec PPT
		7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	Banyaknya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	kali						12	213.409.350	12	207.675.800	12	-	12	-	12	207.675.800	Kec PPT
		7	01	02	2.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kelurahan yang menerima pelayanan persampahan (untuk anggaran 2021 1 kel GANTING)	Banyaknya kelurahan yang menerima layanan persampahan	kel						1	213.409.350	1	207.675.800	0	0	0	0	1	207.675.800	
							Jumlah petugas persampahan yang dibayarkan gajinya	Banyaknya petugas persampahan yang dibayarkan gajinya	orang						6		6	0	0	0	0				
							jumlah sarana persampahan yg dipelihara	Banyaknya sarana persampahan yang dipelihara	unit						1		1	0	0	0	0				
		7	01	02	2.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah peserta sosialisasi pelayanan	Banyaknya masyarakat yang mengikuti sosialisasi pelayanan yang menjadi kewenangan pemerintah kecamatan	orang						30	-	-	-	30	-	20	-	-	-	
		7	01	02	2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan	Banyaknya rapat koordinasi layanan persampahan yang dilaksanakan	kali						48	1.493.619.900	48	1.460.305.360	48	1.632.411.550	48	1.610.964.000	48	4.703.680.910	Kec PPT
		7	01	02	2.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kelurahan yang menerima pelayanan persampahan (untuk anggaran 2021 7 kel)	Banyaknya kelurahan yang menerima layanan persampahan	kel						7	1.493.619.900	7	1.460.305.360	8	1.632.411.550	8	1.610.964.000	8	4.703.680.910	
							Jumlah petugas persampahan yang dibayarkan gajinya	Banyaknya petugas persampahan yang dibayarkan gajinya	orang						42		42	48		48					
							jumlah sarana persampahan yg dipelihara	Banyaknya sarana persampahan yang dipelihara	unit						7		7	8		8					
		7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan	Banyaknya urusan kelembagaan yang dilimpahkan ke kecamatan	lembaga						8	933.646.500	5	840.599.400	11	2.272.253.750	11	1.964.036.000		5.076.889.150	Kec PPT
		7	01	02	2.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									933.646.500		840.599.400		2.272.253.750		1.964.036.000		5.076.889.150		

	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	Perbandingan Jumlah Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan Kecamatan/Kelurahan seperti (RT, LPM, Karang Taruna, PKC, Posyandu, Dadasawit, PPM, PDS, IRMA, dll) dengan Jumlah Pemuda/uda produktif (15 -60 tahun) yang dimyatakan dalam persentase	%															21,78	3.925.914.800	25,17	3.764.708.125	22,17	2.815.961.500	24,00	2.640.400.000	24	9.221.089.625	Kec PPT		
				7	01	03	2	01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan yang dilaksanakan	Banyaknya kegiatan musrenbang Kelurahan	kegiatan					8	83.162.450	8	72.945.600	0		0										72.945.600	Kec PPT	
				7	01	03	2	02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan yang dilaksanakan (musrenbang 8 set)	Banyaknya kegiatan musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan	kegiatan				8	83.162.450	8	72.945.600	0		0											72.945.600		
				7	01	03	2	02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Banyaknya jenis kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	jenis				7	1.563.387.900	7	1.437.710.500	8	626.192.650	8	476.000.000										2.541.903.150	Kec PPT	
				7	01	03	2	02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah musrenbang yang dilaksanakan (untuk anggaran 2021 hanya musren kec)	Banyaknya kegiatan musrenbang yang dilaksanakan	kegiatan				1	38.937.400	1	35.275.400	9	149.135.000	9	110.000.000										294.410.400		
				7	01	03	2	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan sarana prasarana yang dilaksanakan (untuk 2021 kegiatan alat studio gantung TV)	Banyaknya kegiatan sarana prasarana yang dilaksanakan	kegiatan				1	28.233.850	1	28.135.000	1		8	80.000.000										108.135.000		
				7	01	03	2	02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								1.496.216.650	1.374.300.100	477.057.650				288.000.000									2.139.357.750			
									Jumlah peserta yang dilatih	Banyaknya peserta yang mengikuti pelatihan	orang				160		151		200		250	120.000.000										120.000.000			
									Jumlah lembaga LPM yang diberdayakan (2021 LPM terestek di sub keg Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan)	Banyaknya lembaga LPM yang diberdayakan	lembaga				9		9		9		9	108.000.000										108.000.000			
									Jumlah monitoring, evaluasi dan penilaian BBGM yang dilaksanakan	Banyaknya monitoring evaluasi dan penilaian BBGM yang dilaksanakan	pemenang				3				3		3														
									Jumlah pemenang lomba kelurahan berprestasi	Banyaknya kelurahan yang mengikuti lomba	pemenang				3				3		3	15.000.000											15.000.000		
									Jumlah Lembaga Posyantek yang diberdayakan	Banyaknya lembaga Posyantek yang diberdayakan	lembaga				2		2		9		9	27.000.000											27.000.000		
									Jumlah Lembaga Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forink) yg dilaksanakan	Banyaknya lembaga Forink yang diberdayakan	lembaga				0				9		9	18.000.000												18.000.000	
				7	01	03	2	03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah RT	Banyaknya RT di wilayah Kecamatan Padang Panjang Timur	lembaga				103	2.279.364.500	103	2.254.052.025	106	2.189.788.850	106	2.162.400.000	106	2.162.400.000								6.606.240.875	Kec PPT	
				7	01	03	2	03	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis kegiatan RT yang dilaksanakan (untuk 2021 termasuk LPM)	Banyaknya jenis kegiatan RT yang dilaksanakan (keg. lapangan data kependudukan (masuk/datang, keluar/pindah, lahir, mati), ...)	kegiatan				6	2.279.364.500	6	2.254.052.025	6	2.189.788.850	6	2.162.400.000											6.606.240.875	

			7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Angka Tingkat Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kasus pelanggaran yang dilaporkan di kecamatan padang panjang timur	laporan							20	414.868.400	20	155.794.300	15	41.492.000	10	27.000.000	100	224.286.300	Kec PPT
			7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Jenis Kegiatan Koordinasi Trantib	banyaknya rapat dan monev yang dilaksanakan FKPM	jenis							2	414.868.400	2	155.794.300	2	41.492.000	2	27.000.000		224.286.300	Kec PPT
			7	01	04	2.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											414.868.400		155.794.300		41.492.000		27.000.000		224.286.300	
								Jumlah Rapat-rapat FKPM yang dilaksanakan di kecamatan dan kelurahan	Banyaknya monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan FKPM	kali						108	414.868.400	49	155.794.300	108	41.492.000	108	27.000.000		224.286.300		
								Jumlah Monev yg dilaksanakan oleh FKPM	Banyaknya Rapat-rapat FKPM pada kecamatan dan kelurahan	kali					49		48		49		54				-		
								Jumlah Posko Satgas Covid-19 yang di fasilitasi	Banyaknya Posko Satgas Covid-19	posko					9		9		0		0						
			7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	Perbandingan antara Jumlah urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan dengan Jumlah urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai dengan penugasan kepala daerah yang dinyatakan dalam persentase	%						100%	42.242.500	100%	32.111.450	100%	341.091.250	100%	67.400.000	100	440.602.700	Kec PPT	
			7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	Banyaknya urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	urusan						2	42.242.500	2	32.111.450	4	341.091.250	4	67.400.000		440.602.700	Kec PPT	
			7	01	05	2.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas dan Nasional Keamanan Lokal, Regional										33.042.500		23.245.000		267.292.250		40.000.000		330.537.250		
								Jumlah Mushalla yang dikunjungi oleh Tim Ramadhan Kecamatan	Banyaknya Mushalla yang dikunjungi oleh tim ramadhan kecamatan	mushalla					8	33.042.500	8	23.245.000	8		8	40.000.000		63.245.000			
								Jumlah cabang MTQ yang diperlombakan	Banyaknya cabang MTQ yang diperlombakan tingkat kecamatan	cabang/kel ompok					0	-	-	-	8		0	0		-			

				7.01	05	2.0	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan											9.200.000		8.866.450		73.799.000		27.400.000		110.065.450
								Jumlah Rapat yang dilaksanakan oleh Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Kecamatan	Banyaknya rapat koordinasi yang dilaksanakan Forkopimca	kali									4	9.200.000	4	8.866.450	4		4	7.400.000	16.266.450
								Jumlah Peringatan Hari Besar yang dilaksanakan (HUT RI dan HUT Kota)	Banyaknya hari besar (HUT RI dan HUT Kota)	hari besar									2	-	-	-	2		2	20.000.000	20.000.000

Padang Panjang, 10 Mei 2022

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur ini diharapkan mampu mendukung sepenuhnya terhadap keberhasilan Tujuan Pembangunan Daerah sesuai dengan yang dicita-citakan sebagaimana Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang dan juga akan dijadikan pedoman untuk menyusun Rencana Kegiatan Tahunan yang didalamnya memuat Program, Kegiatan serta Target Tahunan. Agar tingkat keberhasilan / hambatan dapat diketahui maka diperlukan Evaluasi Laporan Capaian Kinerja baik di setiap bulan, triwulan, semesteran atau tahunan. Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Kinerja ternyata masih banyak kendala, maka diperlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Padang Panjang, Januari 2023



